

TAJUK RENCANA

Siaga Potensi Kerawanan Pilkada

MESKI protes hasil Pemilu 2024 cukup banyak, namun menurut Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja angka kerawanan Pilkada Serentak 2024 bisa lebih besar dari Pilpres 2024. Pasaalnya, persaingan calon kepala daerah yang sangat tinggi, di masing-masing daerah seluruh Indonesia (KR 16/3).

Seperti diketahui, pilkada serentak akan berlangsung di berbagai daerah di Indonesia pada 27 November 2024. Jika diakumulasikan, terdapat 271 kepala daerah yang lengser selama periode 2022-2023, terdiri dari 24 gubernur, 56 wali kota, dan 191 bupati. Di wilayah inilah akan terjadi pertarungan pemilihan baik petahana atau yang baru.

Ketidakpercayaan terhadap sistem pemilihan sangat mungkin terjadi. Sebagai contoh Pemilu 2024 yang diduga terjadi kecurangan, meski harus dibuktikan tuduhan tersebut. Jika terdapat keraguan terhadap keabsahan atau keadilan proses pemilihan, hal ini dapat menyebabkan ketegangan di antara pemilih dan mendorong potensi konflik.

Potensi kerawanan tersebut harus diwaspadai, dan diantisipasi sejak sekarang. Istilah 'rawan' menurut Bawaslu, suatu peristiwa memiliki potensi untuk menjadi tidak stabil, konflik, atau memiliki risiko tinggi.

Memang ada beberapa alasan mengapa Pilkada dianggap akan rawan. Bagi DIY hal ini penting, karena hampir kabupaten dan kota akan melaksanakan pilkada. KPU sudah mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) No 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwalnya. Mengingat potensi konflik politik pilkada, seringkali memicu ketegangan politik, terutama jika persaingannya antara calon dan partai politik. Hal ini dapat menghasilkan retorika politik yang keras, demonstrasi, atau bahkan kekerasan antarpemilihan.

Di beberapa daerah di Indonesia, isu-isu sosial dan etnis dapat menjadi katalisator ketegangan selama proses pemilihan. Persaingan politik dapat diwarnai oleh ketidaksetaraan, diskriminasi, atau ketegangan

antarkelembaga yang dapat memicu konflik. Bukan tidak mungkin pemilihan lokal dapat menjadi sasaran untuk campur tangan eksternal dari pihak-pihak yang berkepentingan. Baik itu melalui propaganda, dukungan finansial, atau upaya lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil pemilihan. Karena itu pihak luar tentu akan ikut *'cawe-cawe'* guna mensukseskan *'investasi'* nya.

Daerah-daerah tertentu di Indonesia memiliki tantangan keamanan yang berbeda-beda. Ketidakstabilan keamanan dapat meningkatkan risiko gangguan selama pemilihan. Seperti intimidasi terhadap pemilih atau pejabat pemilihan, serta ancaman terhadap keamanan secara keseluruhan.

Untuk mengatasi potensi risiko ini, penting meningkatkan pengawasan yang ketat. Penegakan hukum yang adil dan efektif, serta upaya untuk mempromosikan dialog antarberbagai pihak yang terlibat dalam proses pemilihan. Selain itu, penyelenggara pemilihan dan pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan masyarakat sipil dan lembaga internasional untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 dapat dilaksanakan secara aman, adil, dan demokratis.

Karena itulah semua lembaga yang terkait, harus terus memantau pergerakan kerawanan dari berbagai sisi. Tentu Bawaslu tak bisa bergerak sendiri. Untuk tahapan ini diharapkan peran sinergis TNI, Polri, dan masyarakat lain.

Ada yang sulit ditangani namun terus terjadi, adalah politik uang. Maka perlu digalang pengawasan organisasi masyarakat sipil, termasuk LSM dan kelompok advokasi, dapat memainkan peran penting dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran politik uang. Mereka juga diharapkan memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang hak mereka dan cara melaporkan pelanggaran.

Mengatasi politik uang dalam Pilkada 2024 membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat sipil. □ - d

DI TENGAH kondisi perekonomian sulit, keputusan pemerintah tentang tunjangan hari raya (THR) Lebaran dan gaji ke-13 tentu sangat menggembirakan. Seperti diberitakan di media massa, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan aturan terkait (THR) dan gaji ke-13 untuk ASN dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024. THR dan gaji ke-13 diberikan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian kepada negara.

Yang dimaksud aparaturnegara dan berhak menerima penghargaan tersebut, terdiri dari PNS dan calon PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara.

Beleid yang diteken Jokowi pada 13 Maret itu menjelaskan, anggaran THR dan gaji ke-13 aparatur negara berasal dari APBN. Besaran THR PNS diberikan dalam bentuk paket lengkap yang terdiri dari lima komponen, yaitu gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja.

Diberikan Utuh
Ketika harga berbagai kebutuhan pangan tengah naik, kucuran THR dan gaji ke-13, tentu akan memperkuat daya beli masyarakat, khususnya para penerima. Harapan pemerintah, pemberian THR dan gaji ke-13 akan dapat mengungkit laju pertumbuhan ekonomi hingga 5,2%.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, THR tidak diberikan secara utuh. Tahun ini THR akan diberikan utuh. Sebagaimana diketahui, pada 2020, misalnya, komponen tunjangan kinerja dalam THR tidak diberikan sama sekali. Pejabat negara dan ASN dengan jabatan tinggi juga tidak menerima THR. Waktu itu, kondisi keuangan negara benar-benar sedang bermasalah karena Covid-19.

Di tahun 2021, kondisi agak membaik. Meski tunjangan kinerja masih dibekukan, tetapi THR dan gaji ke-13 kembali diberikan kepada seluruh pe-

Bagong Suyanto

gawai negeri. Bukan hanya ASN pelaksana, tetapi juga ASN eselon I-III serta para pejabat negara. Di tahun 2022, tunjangan kinerja kembali diberikan, tetapi jumlahnya hanya separuh. Tahun 2023, tunjangan kinerja tetap diberikan separuh, tetapi pemberian tunjangan juga



KR-JOKO SANTOSO

diberikan kepada kalangan guru, dosen, dan profesor.

Di tahun 2024, angin segar berhembus. Pemerintah telah memutuskan untuk kembali mencairkan seluruh komponen THR dan gaji ke-13 seutuhnya alias 100%. Semua golongan ASN kali ini kebagian. Menurut jadwal, THR akan mulai dicairkan H-10 hari raya Idul Fitri atau pada 22 Maret 2024. Pemberian THR yang kembali utuh ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai target sebesar 5,2 persen.

Menurut kalkulasi sederhana, ketika uang yang beredar naik, tentu daya beli akan meningkat dan aktivitas produksi

akan berputar lebih kencang. Selama bulan Maret hingga April, bisa dipastikan pergerakan aktivasi perekonomian akan meningkat. Cuma, yang menjadi masalah pasca pencairan THR dan gaji ke-13, apakah kondisi perekonomian nasional akan tetap bergairah? Benarkah kucuran rejeki di bulan Maret dan April dan menggerakkan *multiplier effect* yang signifikan?

Relatif Baik

Pertanyaan-pertanyaan itulah yang kini masih menunggu jawaban. Alokasi sebesar 99,5 triliun yang digelontorkan untuk THR dan gaji ke-13 memang besar. Namun, berharap kucuran THR dan gaji ke-13 dapat mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi hingga 5,2% tentu tidak mudah. Walau pun kondisi perekonomian nasional masih relatif baik, tetapi kita tidak menutup mata bahwa kondisi perekonomian global masih bermasalah.

Kita tentu perlu memastikan agar kucuran THR dan gaji ke-13 tidak justru menjadi bumerang yang memicu munculnya inflasi. Alih-alih berdampak bagi pertumbuhan ekonomi, ketika uang yang beredar di masyarakat meningkat, justru yang terjadi adalah ancaman terjadinya inflasi. Pada titik ini, yang terjadi tentu malah lebih banyak hal yang merugikan daripada menguntungkan. □ - d

***)Prof Dr Bagong Suyanto, Dekan FISIP Universitas Airlangga.**

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa memampikan fotocopy identitas. Terimakasih.

Hari Penyiaran Publik yang Terabaikan

Darmanto

nyiaran pemerintah.

Kecenderungan yang sama juga terjadi di LPP. Meskipun secara formal sudah menyatakan diri berubah menjadi LPP didukung adanya Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukumnya, tetapi tidak satu pun lembaga penyiaran publik lokal yang *negeh* dengan tanggal 18 Maret sebagai momen penting bagi LPP. Hal itu menunjukkan bahwa hakekat penyiaran publik tidak tersosialisasi dengan baik di kalangan masyarakat luas Indonesia sehingga mereka tidak perlu mengingat hari jadi LPP.

Di luar lembaga penyiaran juga tidak ada perhatian. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kominfo, belum memiliki inisiatif untuk menyelenggarakan peringatan Hari Penyiaran Publik Nasional sebagai upaya untuk membangun kesadaran

masyarakat mengenai pentingnya LPP. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Daerah (KPIP/KPID) sejauh ini belum terdengar informasinya akan mengadakan kegiatan untuk memperingati hari lahirnya LPP. Apalagi masyarakat pada umumnya.

Di era distrupsi digital yang membuat media arus utama mengalami kegagalan untuk memertahankan keberlanjutannya. Ini akibat tidak adanya dukungan ekonomi dan politik yang kuat. Padahal, keberadaan LPP sebenarnya sangat diharapkan. Namun, kalau mereka sendiri tidak sadar pada eksis-

tensi dirinya, dan tidak bergerak dari zona nyaman sebagai LPP tentu akan sulit menarik perhatian masyarakat luas untuk peduli.

Memasuki usia ke-20 tahun depan, diharapkan ada kepedulian dari pemangku kepentingan utama, yaitu RRI, TVRI, LPP, Pemerintah, KPIP/KPID, dan masyarakat sipil secara kolaboratif melakukan gerakan strategis untuk melakukan pengarusutamaan tentang penyiaran publik. Namun, yang paling menentukan masyarakat mau peduli atau tidak terhadap penyiaran publik adalah sikap proaktif LPP itu sendiri. Sebab, LPP sebenarnya memiliki sumber daya yang besar untuk mempromosikan dirinya agar dikenal masyarakat luas sebagai LPP. Kuncinya, mereka harus bersedia *move on* dari kenanganannya. □ - d

***)Darmanto, peneliti pada Pusat Riset Kebijakan Publik, BRIN, Pemerhati Masalah Penyiaran.**

Pojok KR

TPA sampah Piyungan ditutup resmi 15 April 2024
-- Masalah lama yang selalu kesulitan sosial

5-7 April puncak arus mudik.
-- Sambut tamu dengan baik, jangan 'aji mumpung'

Jalan Godean yang rusak, diperbaiki setelah Idul Fitri.
-- Siap-siap pemudik berwisata 'jeglengan sewu'.

Berabs

PIKIRAN PEMBACA

Naskah bisa dikirim Email atau WA

pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/Scan KTP

atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40 - 42 Yogyakarta 55323.

Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks.
Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Kontrol Lemah, Bullying Kembali Terjadi

KASUS bullying banyak terjadi pada sebulan ke belakang yang kembali menambah luka pilu anak. Kasus kekerasan pada anak di sekolah akan membuat trauma yang berat (*post-traumatic stress disorder*) bagi korban. Maka kasus bullying ini harus segera ditangani dan tidak boleh terjadi kembali.

Penyebab dari perilaku bullying ini adalah buah dari sistem sekularisme, sebab sistem hari ini dibangun dengan pemisahan antara agama dengan kehidupan, peran keluarga yang seharusnya menjadi tempat pendidikan pertama justru menjadi alasan kerusakan generasi. Kelalaian orang tua dalam mendidik anaknya dengan keimanan, ketataan dan tidak adanya contoh keteladanan sikap yang baik kepada orang lain. Sehingga lahir generasi yang nirabad dan jauh dari aturan agama. Generasi muda tumbuh dengan nilai-nilai sekuler

yang hanya mengejar kenikmatan duniawi, kehidupan liberal dan hedonistik menjadi standar dalam berperilaku. Kondisi diperparah dengan lingkungan yang sekuler, yang membentuk masyarakat apatis, egois dan individualistik.

Ajaran Islam dapat menjadi solusi, termasuk dalam permasalahan bullying. Kurikulum pendidikan di desain dengan penanaman aqidah Islam yang kuat dan negara memberikan pendidikan gratis kepada warganya, sehingga orang tua tidak dibebani biaya pendidikan. Negara juga menawarkan peluang karir bagi laki-laki sebagai kepala keluarga. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, ibu fokus merawat generasi, sehingga peran keluarga menjadi sekolah pertama bagi anak dan produk-produk generasi yang gagal tidak lagi ditemukan.

Azizah Rasad, mahasiswa di Yogya asal Lampung.

LEMBAGA Penyiaran Publik (LPP) lahir melalui UU Nomor 32 Tahun 2002, meniadakan eksistensi Lembaga Penyiaran Pemerintah yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 1997. Namun, aturan pelaksanaan untuk penyelenggaraan penyiaran publik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 11, 12, dan 13 ditandatangani tanggal 18 Maret 2005. Artinya, kalau merujuk pada dokumen tersebut, berarti hari lahirnya LPP RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPP) adalah tanggal 18 Maret. Sayangnya, tanggal tersebut tidak pernah diperingati sebagai hari jadi LPP.

Meskipun genap 19 tahun usia LPP pada 2024, tetapi para pemangku kepentingan utama, yaitu RRI, TVRI, dan LPP tidak ada *sense* untuk memperingatinya. RRI masih mengagendakan 11 September sebagai hari jadinya, dan TVRI memperingati HUT-nya setiap 24 Agustus. Padahal kedua tanggal itu merupakan hari kelahiran mereka sebagai lembaga penyiaran pemerintah. Di sisi lain, seluruh dokumen resmi terkait, penulisan RRI dan TVRI selalu didahului dengan kata 'LPP'.

Paradoks

Ketika RRI - TVRI tetap merayakan hari jadinya 11 September dan 24 Agustus, secara simbolik hal itu menunjukkan bahwa keduanya secara sadar memilih tetap sebagai lembaga penyiaran pemerintah yang secara formal sudah tidak memiliki landasan hukum. Kondisi yang ada saat ini sebenarnya adalah suatu paradoks yang harus segera diakhiri. Sebab, kalau dibiarkan terus akan memiliki implikasi luas, yakni esensi lembaga penyiaran publik tidak kunjung dipahami masyarakat luas, padahal secara yuridis formal tidak ada lembaga pe-

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo S.Sos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **General Manager:** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustiw, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subhan Mustafa, Drs Hasto Sutardi, Muhammad Fauzi S.Sos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari S.Sos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Eddy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrk23@yahoo.com, iklankrk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)... Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi DI s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55323. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)